



**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Rachmad Jodi Andriansyah

NPM. 21801082230



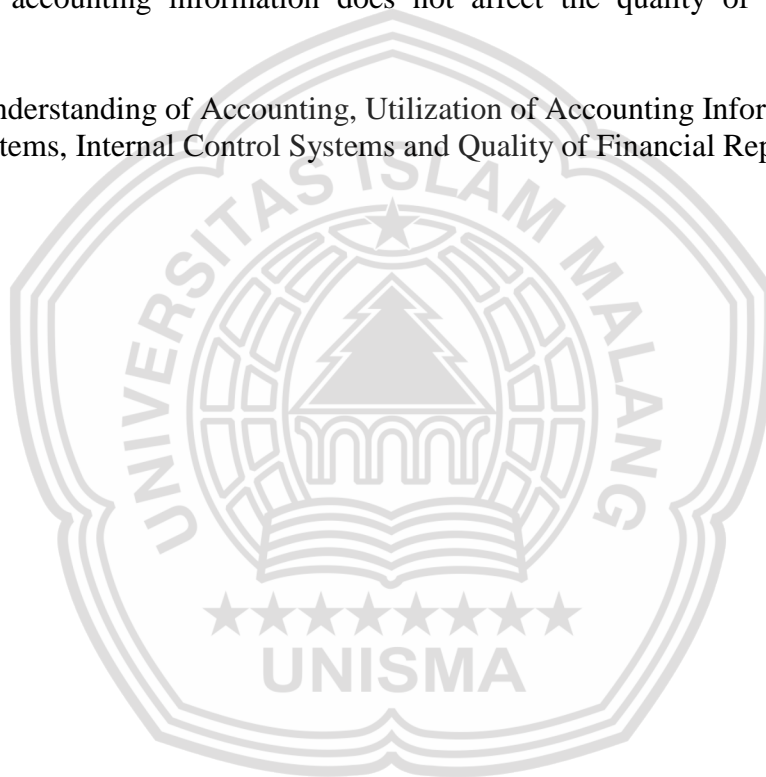
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2022

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of understanding accounting, the utilization of accounting information systems and internal control systems on the quality of financial reports. The population in this research were employees of the Accounting and Administration Division in BPKAD Malang city totaling 59. The technique used in this research was purposive sampling and the sample chosen was 53 respondents. The data taken by using primary data. The data was collected using a questionnaire method. The data analysis technique in this research used multiple linear regression analysis with the help of SPSS software version 20 for Windows. The test data used in this research were the simultaneous hypothesis test (f), the coefficient of determination (R^2) and the partial hypothesis test (t). The results of this research understanding of accounting and internal control systems affect the quality of financial statements, and the utilization of accounting information does not affect the quality of financial statements.

Keywords: Understanding of Accounting, Utilization of Accounting Information Systems, Internal Control Systems and Quality of Financial Report.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah staf di BPKAD Kota Malang yang berjumlah 59. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* dan sampel yang terpilih berjumlah 53 responden. Data yang digunakan merupakan data primer. Data diambil dengan menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan menggunakan *software SPSS 20 for Windows*. Data uji yang digunakan dalam penelitian adalah uji hipotesis simultan (f), koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis parsial (t) Hasil penelitian ini adalah pemahaman akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan Good Governance mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan *Good Governance*, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur seluruh aspek teknis, antara lain regulasi, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah dan peningkatan sumber daya manusia. Salah satu bentuk keberhasilan pemerintah adalah dihasilkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Laporan keuangan adalah sarana bagi sebuah entitas untuk melaporkan kinerja keuangannya kepada publik. Dalam menyajikan laporan keuangan, entitas harus mampu memberikan informasi yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan dan tugas pembantuan. BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan BPKAD adalah pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan, dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam pemerintahan, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat. Demikian juga dengan bagian keuangan yang harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi dan ilmu keuangan terkait lainnya. Pentingnya pemahaman akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah karena pelaporan keuangan daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memahami akuntansi pemerintahan, yang akan berdampak positif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan berkualitas. Oleh karena itu, bentuk dan isi laporan keuangan daerah diharapkan dapat disusun dan disajikan secara andal dan relevan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2014).

Dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang berkualitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) keuangan daerah merupakan penerapan sistem yang dimulai dari pengelompokan, pengklasifikasian, pencatatan dan pengolahan aktivitas keuangan daerah dalam suatu laporan keuangan sebagai informasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan. BPKAD memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah sebagai dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi juga membantu menciptakan sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat. Sistem informasi ini dikenal sebagai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

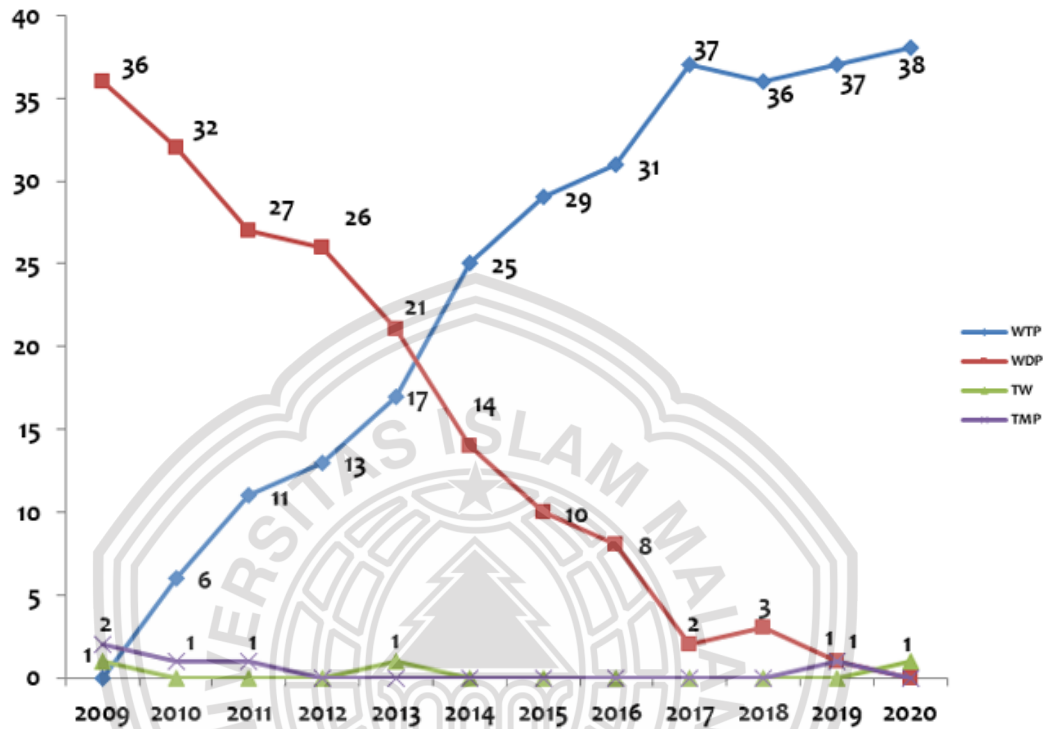
Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh kualitas pengendalian internal pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah peran audit internal dalam melakukan pengawasan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memastikan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian internal yang lemah mempersulit pendeteksian kecurangan/ketidakkuratan dalam proses akuntansi, membuat bukti audit dari data - data akuntansi tidak kompeten (Winidyaningrum & Rahmawati, 2009).

Penyusunan laporan keuangan adalah proses paling penting bagi sebuah organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi tersebut selama periode waktu tertentu. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor dari pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Saat BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berarti LKPD tersebut telah disajikan dan diungkapkan dengan wajar dan berkualitas. Menurut ketentuan perundang-undangan, kriteria yang digunakan untuk menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan laporan keuangan adalah :

- a. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan
- b. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
- d. Kecukupan Pengungkapan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan hasil pemeriksaan entitas di Jawa Timur, selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2020 (12 tahun), jumlah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

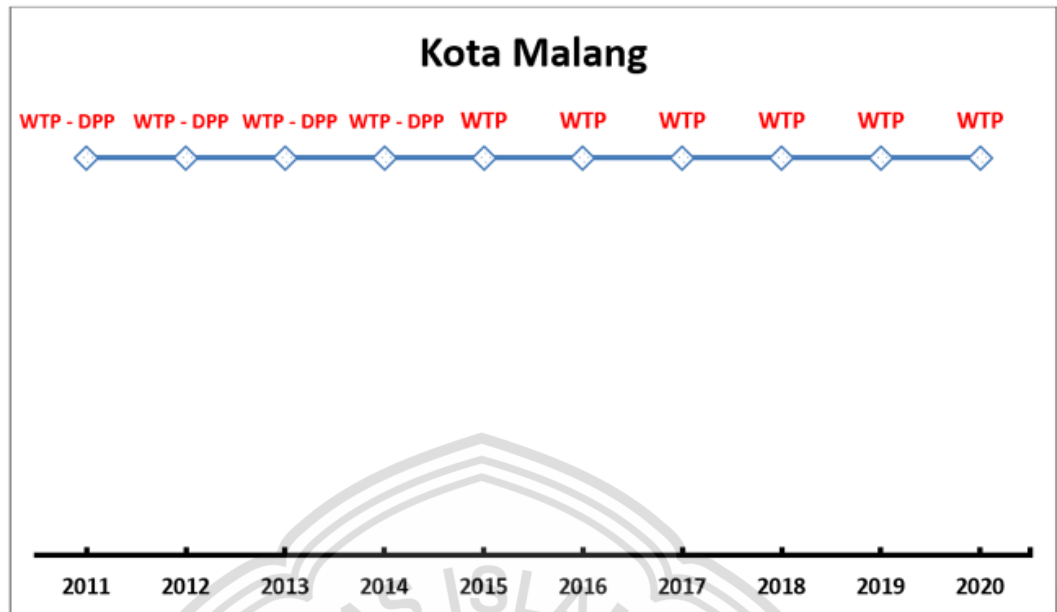
terus meningkat. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.1

Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/tahukah-anda/trend-perolehan-wtp-pada-entitas-pemeriksaan-di-jawa-timur/> (2020)

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Malang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut mulai tahun 2011 hingga tahun 2020. Keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penghargaan atas keberhasilan mewujudkan akuntabilitas atas kinerja pemerintah yang baik.



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

Sumber. <https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kota-malang/> (2020)

Namun, Opini WTP tidak menjamin tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan atau terbebasnya suatu lembaga dari perbuatan korupsi (*fraud*). Hal ini karena pemeriksaan BPK terhadap LKPD tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan korupsi (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah. Akan tetapi, apabila hasil pemeriksaan LKPD ditemukan penyimpangan, penyelewengan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum, khususnya yang berdampak pada potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut akan diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 masih ditemukan beberapa permasalahan, meski tidak mempengaruhi kewajaran terhadap penyajian laporan keuangan, seperti penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih belum tertib. Selain itu, adanya

pembayaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang masih kurang memadai. BPK juga menemukan pengeluaran yang tidak terduga berupa bantuan sosial sebagai bagian dari upaya penanganan Covid-19 yang belum sesuai dengan ketentuan dan bisa terjadi potensi tidak tepat sasaran.

BPK berharap agar semua pemerintah daerah tetap serius dalam menindaklanjuti rekomendasi yang BPK berikan dalam laporan hasil pemeriksaan, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sehingga perlu adanya perbaikan sistem kerja pegawai pemerintah daerah khususnya pada bagian penatausahaan keuangan, agar kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat dan memiliki nilai yang akurat. Berdasarkan uraian diatas, motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pemerintahan Kota Malang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 10 kali berturut-turut serta apakah variabel independen yang ada dalam penelitian ini yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern mempengaruhi Pemerintah Kota Malang dalam mempertahankan kualitas laporan keuangannya.

Hasil penelitian terdahulu Lestari (2020) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap laporan keuangan. hasil

penelitian. Saputra (2016) menyimpulkan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Diani (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman akuntansi, peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota PARIAMAN. Dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota PARIAMAN,

Berdasarkan fenomena dan mengacu pada penelitian terdahulu, dapat ditarik suatu judul penelitian, yaitu : “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang sistem pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Instansi (Pemerintahan Kota Malang)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan serta bahan pengembangan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Instansi Pemerintahan Kota Malang khususnya dalam hal pelaporan laporan keuangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4. Sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

5.2 Keterbatasan Penelitian

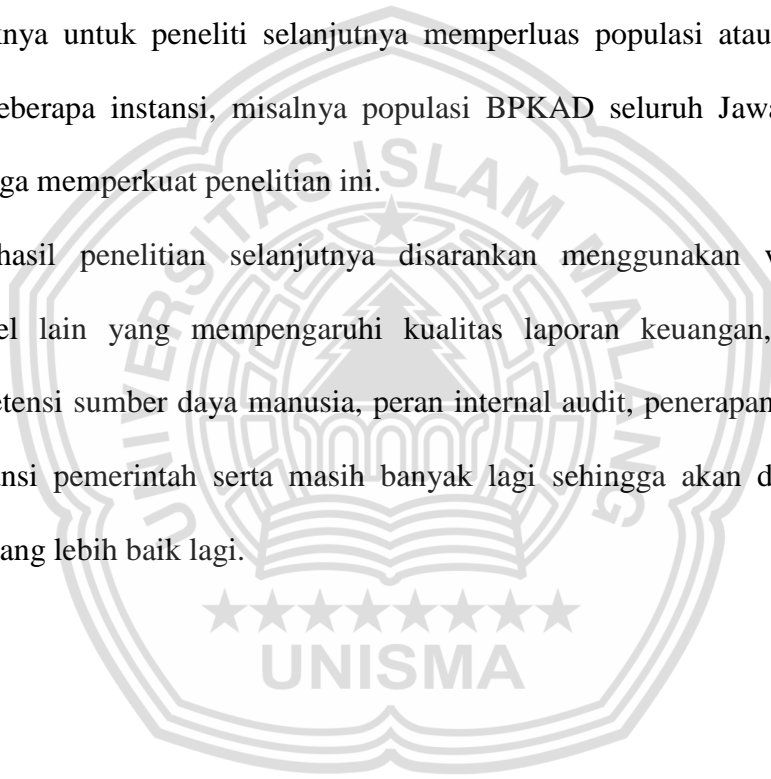
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner sehingga ada keterbatasan informasi yang didapatkan dari setiap respondennya.
2. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas staf BPKAD Kota Malang
3. Pada penelitian ini hanya terbatas menggunakan variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat dari setiap responden.
2. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya memperluas populasi atau sampel dari beberapa instansi, misalnya populasi BPKAD seluruh Jawa Timur sehingga memperkuat penelitian ini.
3. Dari hasil penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, penerapan standar akuntansi pemerintah serta masih banyak lagi sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arti Kata Paham - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.* (N.D.).
Retrieved October 27, 2021, From <https://kbbi.web.id/paham>
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.* (N.D.). Retrieved October 9, 2021, From <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-ppkad/>
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota PARIAMAN). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/897>
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, Ni Luh Wayan Ttya, Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11.*
- LKPD Kabupaten Malang / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.* (N.D.).
Retrieved December 29, 2021, From <https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-malang/>
- LKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 – WTP / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.* (N.D.). Retrieved December 29, 2021, From

<https://Jatim.Bpk.Go.Id/Hasil-Pemeriksaan/Lhp-Lkpd/Lkpd-Kabupaten-Malang-Tahun-2020-Wtp/>

LKPD Kota Batu | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (N.D.). Retrieved December 29, 2021, From <https://Jatim.Bpk.Go.Id/Lkpd-Kota-Batu/>

LKPD Kota Batu Tahun 2020 – WTP | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (N.D.). Retrieved December 29, 2021, From <https://Jatim.Bpk.Go.Id/Hasil-Pemeriksaan/Lhp-Lkpd/Lkpd-Kota-Batu-Tahun-2020-Wtp/>

LKPD Kota Malang | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (N.D.). Retrieved December 29, 2021, From <https://Jatim.Bpk.Go.Id/Lkpd-Kota-Malang/>

LKPD Kota Malang Tahun 2020 – WTP | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (N.D.). Retrieved October 9, 2021, From <https://Jatim.Bpk.Go.Id/Hasil-Pemeriksaan/Lhp-Lkpd/Lkpd-Kota-Malang-Tahun-2020-Wtp/>

PP No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [JDIH BPK RI]. (N.D.). Retrieved October 27, 2021, From <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/49722/Pp-No-56-Tahun-2005>

PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [JDIH BPK RI]. (N.D.). Retrieved October 27, 2021, From <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/4876>

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [JDIH BPK RI]. (N.D.). Retrieved October 27, 2021, From <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/5095/Pp-No-71-Tahun-2010>

PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah [JDIH BPK RI]. (N.D.). Retrieved October 27, 2021, From

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/49029/Pp-No-8-Tahun-2006>

Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05).

<http://Www.Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra/Article/View/8286>

Saputra, A., Satriawan, R. A., & -, S. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1–15.

<https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFEKON/Article/View/8834>

Sari, N., Hasan, A., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bu. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1478–1490.

<https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFEKON/Article/View/11469>

Silviana, & Antoni, E. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat*.

[Http://Repository.Widyatama.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/7301](http://Repository.Widyatama.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/7301)

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Trend Perolehan WTP Pada Entitas Pemeriksaan Di Jawa Timur | BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (N.D.). Retrieved October 9, 2021, From
[Https://jatim.bpk.go.id/Tahukah-Anda/Trend-Perolehan-Wtp-Pada-Entitas-Pemeriksaan-Di-Jawa-Timur/](https://jatim.bpk.go.id/Tahukah-Anda/Trend-Perolehan-Wtp-Pada-Entitas-Pemeriksaan-Di-Jawa-Timur/)

Tugas Dan Fungsi. (N.D.). Retrieved October 9, 2021, From

[Https://bpkad.malangkota.go.id/Tupoksi/](https://bpkad.malangkota.go.id/Tupoksi/)

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI] (n.d.). Retrieved February 2, 2022, from
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuliani, S., Nadirsyah, N., & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/340>